

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan meningkatkan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi diyakini oleh sebagian besar ekonom sebagai indikator yang paling tepat dalam menggambarkan proses kemajuan pembangunan suatu negara (Arsyad, 2010).

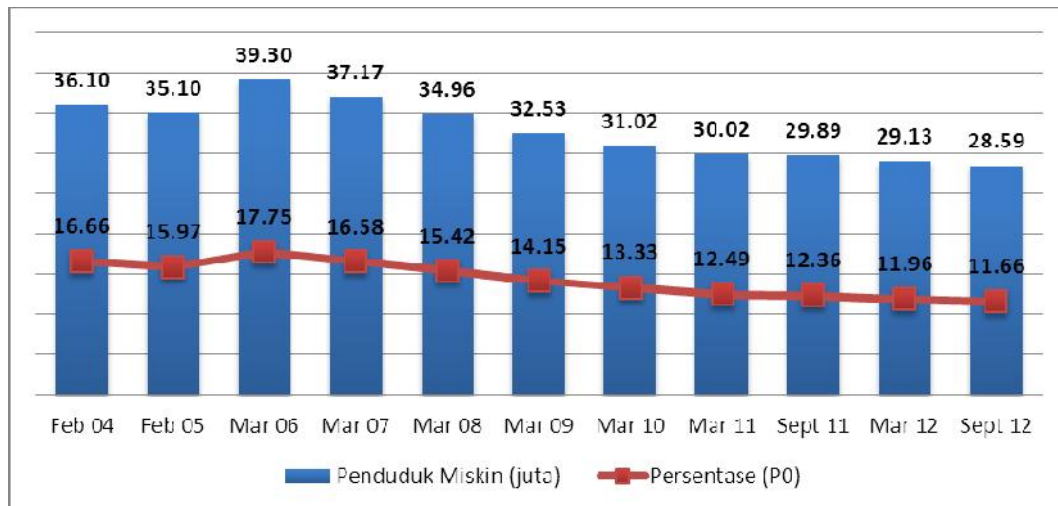
Di negara-negara maju ada beberapa tekanan untuk menggeser orientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju ke upaya-upaya yang lebih memperhatikan kualitas hidup seperti adanya gerakan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, di negara sedang berkembang (NSB) yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Pada tahun 1960-an, sebagian besar NSB yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. tingkat pengangguran dan pengangguran semu meningkat didaerah perdesaan dan perkotaan serta distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin tidak merata.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2006). Pengukuran kemiskinan ini didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan elemen kedua sifatnya lebih subyektif.

Secara umum Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia relatif menurun. Pada tahun 2004 ke 2005 jumlah penduduk kemiskinan menurun. Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 1.1

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004–2012



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2013*

Sedangkan Gambaran umum di daerah khususnya Jawa Tengah jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2010 sebesar 5,369 juta orang (16,56 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2009 yang berjumlah 5,726 juta orang (17,72 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 356,53 ribu orang. Selama periode Maret 2009 – Maret 2010, penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah didaerah perkotaan turun 162,00 ribu orang, lebih rendah dibanding di daerah perdesaan turun sebesar 194,53 ribu orang. Di Provinsi Jawa Tengah, selama Periode Maret 2009 – Maret 2010 persentase penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Bulan Maret 2010, sebagian besar (57,93 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan dan pada Bulan Maret 2009 sebesar 57,72 persen. Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Maret 2010 sebesar Rp 192.435,- perkapita per bulan. Pengeluaran untuk

membiayai makanan sebesar 72,68 persen, sedangkan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) hanya sebesar 27,32 persen.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1.1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 2,338 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 6,418 juta orang pada tahun 1996 menjadi 8,755 juta orang pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 21,61 persen menjadi 28,46 persen pada periode yang sama.

Tabel 1.1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Menurut Daerah Tahun 1996-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1996	1.973	4.444	6.418	20,67	22,06	21,61
1999	3.062	5.623	8.755	27,8	28,05	28,46
2002	2.762	4.546	7.308	20,5	24,96	23,06
2003	2.520	4.459	6.980	19,66	23,19	21,78
2004	2.346	4.497	6.843	17,52	23,64	21,11
2005	2.671	3.862	6.533	17,24	23,57	20,49
2006	2.958	4.142	7.100	18,9	25,28	22,19
2007	2.687	3.869	6.557	17,23	23,45	20,43
2008	2.556	3.633	6.189	16,34	21,96	19,23
2009	2.420	3.304	5.725	15,41	19,89	17,72
2010	2.258	3.110	5.369	14,33	18,66	16,56

Sumber : BPS Jateng 2010

Pada periode tahun 2002-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 7,308 juta orang pada tahun 2002 menjadi 6,534 juta orang pada Pebruari 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin

dari 23,06 persen pada tahun 2002 menjadi 20,49 persen pada Pebruari 2005. Pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, yaitu dari 6,534 juta orang (20,49 persen) pada Bulan Pebruari 2005 menjadi 7,101 juta (22,19 persen) pada Bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 0,287 juta orang, sementara di daerah perdesaan bertambah 0,280 juta orang. Peningkatan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari Pebruari 2005 keMaret 2006 disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada 1 September 2005, yang kemudian memacu kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya. Namun pada tahun 2007 hingga tahun 2009, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari 7,101 juta orang (22,19 persen) pada Bulan Maret 2006 turun menjadi 6,190 juta orang (19,23 persen) pada Bulan Maret 2008. Pada periode yang sama, penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,402 juta orang, sementara di daerah perdesaan turun 0,509 juta orang (BPS Jateng, 2010).

Sejalan dengan berfluktuatifnya jumlah kemiskinan di Jawa Tengah, ternyata tingkat pengangguran juga secara bersamaan mengalami fluktuatif, dimana jumlah penduduk berusia lima belas tahun atau lebih, yaitu penduduk yang termasuk sebagai kelompok usia kerja, pada Februari 2010 sebanyak 24.839.061 orang. Dari kelompok usia kerja tersebut sebanyak 17.130.931 orang tergolong dalam angkatan kerja. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja adalah 68.97 persen yang selanjutnya biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah kelompok orang yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan,

mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah diterima kerja tapi belum mulai bekerja. Penduduk bekerja pada Februari 2010 sebanyak 15.956.034 (93,14 persen) orang dan pengangguran sebanyak 1.174.897 orang atau 6,86 persen. Persentase ini umum dikenal sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sisa dari penduduk usia kerja sebanyak 7.708.130 orang (sekitar 31,03 persen) tergolong sebagai bukan angkatan kerja (BPS Jawa Tengah, 2010).

Bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2009, TPAK Februari 2010 meningkat sebesar 1,38 persen point. Sementara TPT keadaan bulan Februari 2010 menurun sebesar 0,42 persen point dibandingkan TPT Februari 2009 (7,28 persen).

Tabel 1.2

Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak

		Agustus 2009		Februari 2010	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Angkatan Kerja	Bekerja	15.835.382	64,19	15.956.034	64,24
	Pengangguran	1.252.267	5,08	1.174.897	4,73
	Total	17.087.649	69,27	17.130.931	68,97
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	1.879.303	7,62	1.989.060	8,01
	Mengurus RT	4.271.035	17,31	4.311.058	17,36
	Lainnya	1.431.538	5,8	1.408.012	5,67
	Total	7.581.876	30,73	7.708.130	31,04
Total Penduduk 15+		24.669.525	100,00	24.839.061	100,00

Sumber: *BPS Jawa Tengah, 2010.*

Kemudian, bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya (Agustus 2009), yang mempunyai komposisi 69,27 persen Angkatan Kerja dan 30,73 persen Bukan Angkatan Kerja, maka keadaan TPAK Februari 2010 mengalami

penurunan sebesar 0,3 persen point. Sedangkan TPT Februari 2010 dibandingkan dengan Agustus 2009 mengalami penurunan sebesar 0,47 persen.

Selanjutnya tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.hubungan kemiskinan dengan investasi di sektor pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga memberikan kesadaran pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri maupun kemandirian. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai sehingga tidak adanya tabungan ataupun investasi (pengelolaan uang). Sedangkan untuk pemerintah, upaya mengurangi kemiskinan yang ada sangat diperlukan peranan investasi bukan hanya investasi dibidang pendidikan saja akan tetapi disetiap sektor dan yang paling penting adalah investasi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) sebagai modal bagi

pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa.

Penting bagi setiap warga maupun pemerintah khususnya pemerintah Jawa Tengah untuk saling bekerjasama memfokuskan perhatian mereka dalam memberantas kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dimana mereka banyak menghadapi beragam masalah yang terjadi, diantaranya adalah kurangnya peran pemerintah secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja yang mana itu bisa menjadi alternatif untuk menurunkan angka pengangguran, wilayah tempat tinggal yang terisolasi baik terhadap dunia luar maupun terhadap akses-akses yang seharusnya mereka nikmati sebagai fasilitas negara terutama akses akan sumber daya terlebih pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin banyak yang putus sekolah. Mereka sulit dapat bertahan dan menggapai cita-cita menjadi orang yang terdidik dan berguna karena kenaikan biaya hidup tidak lagi mampu ditanggung oleh keluarga mereka, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan masyarakat yang menjadi relatif lambat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 1993-2012”**

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh investasi, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan.

D. Manfaat Penelitian

Ketika penelitian ini selesai dilaksanakan, maka diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Memberi sumbangan pemikiran dan manfaat pada berbagai pihak, terutama bagi pemerintah Jawa Tengah tentang pengaruh investasi, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan.
2. Sebagai referensi penelitian yang akan datang tentang penyebab terjadinya kemiskinan.

E. Metode Penelitian

Analisis ini menggunakan uji ECM sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews. Berikut langkah-langkahnya:

1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat model analisis regresi linier ini meliputi Uji Heteroskedastisitas (*Uji White*), Autokorelasi (*Uji Breusch Godfrey*), Uji Spesifikasi Model (*Uji Ramsey-Reset*), dan Uji Normalitas Ut (*Uji F*).

2. Uji Error Correction Model (ECM)

ECM (*Error Correction Model*) atau model koreksi kesalahan mengasumsikan keberadaan suatu hubungan *equilibrium* jangka panjang serta konsisten atau tidaknya suatu model antara dua atau lebih variabel ekonomi. Formulasi model koreksi kesalahan (ECM) adalah sebagai berikut:

Fungsi Jangka Panjang

$$KM_t^* = 0 + 1IN_t + 2PG_t + 3PN + Ut$$

Keterangan:

KM = Tingkat Kemiskinan

IN = Tingkat Investasi

PG = Tingkat Pengangguran

PN = Tingkat Pendidikan

0 = konstanta

Ut = Nilai Residual

1, 2, 3 = Pengaruh jangka panjang

Fungsi Jangka Pendek Standar

$$KM_t = \alpha_0 + \alpha_1 IN_t + \alpha_2 PG_t + \alpha_3 PN_t - (\alpha_0 + \alpha_1 IN_{t-1} + \alpha_2 PG_{t-1} + \alpha_3 PN_{t-1}) + V_t$$

Keterangan:

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Pengaruh jangka pendek

λ = Koefisien standar adjustment ($0 < \lambda < 1$)

Fungsi Estimasi Jangka Pendek

$$KM_t = \alpha_0 + \alpha_1 IN_t + \alpha_2 PG_t + \alpha_3 PN_t + \alpha_4 IN_{t-1} + \alpha_5 PG_{t-1} + \alpha_6 PN_{t-1} + \lambda ECT + V_t$$

Keterangan:

$$\alpha_0 = \lambda \beta_0$$

$$\alpha_4 = -(\alpha_1 - \lambda)$$

$$\alpha_1 = \alpha_1$$

$$\alpha_5 = -(\alpha_2 - \lambda)$$

$$\alpha_2 = \alpha_2$$

$$\alpha_6 = -(\alpha_3 - \lambda)$$

$$\alpha_3 = \alpha_3$$

$$\alpha_7 = -(\alpha_4 - \lambda)$$

$$\alpha_8 = \lambda$$

$$ECT = IN_{t-1} + PG_{t-1} + PN_{t-1} - KM_{t-1}$$

Baik atau tidaknya spesifikasi model dengan ECM dapat dilihat pada uji statistik terhadap koefisien ECT. Koefisien ECT pada persamaan estimasi jangka pendek adalah $IN_{t-1} + PG_{t-1} + PN_{t-1} - KM_{t-1}$, mensyaratkan nilai yang menunjukkan angka positif antara 0 sampai 1 ($0 < ECT < 1$).

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang definisi dan teori teori-teori yang relevan dari variabel dependen dan independen yaitu kemiskinan, investasi, pendidikan, dan pengangguran. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya serta hipotesis sementara dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel serta metode analisis data.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan

Menguraikan tentang diskripsi data. Pembahasan dan hasil analisis yang meliputi uji asumsi klasik, Uji *Error Correction Model* (ECM), serta interpretasi ekonomi.

Bab V Penutup

Membahas kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran